

DUKUNG DESTINASI WISATA YANG LENGKAP

Sleman Upayakan Geopark Tunjang Perekonomian Masyarakat

SLEMAN (KR) - Kabupaten Sleman tak hanya memiliki keunggulan pada potensi alam, namun potensi masyarakat yang ada juga tumbuh dengan baik menjadi keistimewaan Kabupaten Sleman.

Kehadiran Geopark diharapkan dapat ikut menunjang Sleman sebagai destinasi wisata yang lengkap, baik untuk destinasi wisata alam, buatan, maupun nilai-nilai tradisi yang masih hidup di masyarakat. Dengan begitu, hal ini akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sleman.

Hal tersebut diungkapkan Sekda Sleman Susmi-

arto saat menerima tim verifikasi Geopark di Garden Space Breksi Prambanan, Selasa (23/7) malam.

Tim verifikasi dipimpin Rudi Suhendar menilai 7 Geosite Jogja yang berada di Kabupaten Sleman.

"Mudah-mudahan nanti setelah ada penilaian kita harapkan dapat menjadi nilai terbaik untuk Sleman, menambah nilai komparasi Sleman, dan mendukung daya tarik

wisata Sleman. Begitu juga dengan potensi meningkatnya kesejahteraan masyarakatnya," jelas Susmiarto.

Sementara Ketua Tim Verifikator Komite Nasional Geopark Indonesia (KNGI) Rudi Suhendar menilai, potensi yang dimiliki Sleman telah mencerminkan 3 pilar pengelolaan Geopark yakni, konsep edukasi, konsep konservasi dan konsep pemberdayaan masyarakat. Kondisi alam yang dimiliki Yogya khususnya di Sleman, memberikan peranan penting untuk mewujudkan Geopark Nasional DIY.

"Kami semua sudah melihat potensinya. Tinggal

nanti membuat satu keemasan dari aspek konservasi yang dikemas juga untuk edukasi pada semua level. Kami berharap, nanti mulai dari level TK, SD, sampai universitas sudah bisa mengenal geopark itu seperti apa. Nah itulah nanti tugas dari pengelola, dan instansi terkait," jelasnya.

Kepala Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan (PIWP2) Setda DIY Yudi Ismono menambahkan, Kabupaten Sleman menjadi kunci penting terkait keistimewaan DIY, mulai dari Gunung Merapi hingga Pantai Parangtritis. (Has)-f



Sekda Sleman Susmiarto menyerahkan cenderamata kepada tim verifikasi. (KR-Istimewa)

TMMD Sengkuyung Ikut Gerakkan Roda Perekonomian

SLEMAN (KR) - Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung tahap III Tahun 2024 di Kabupaten Sleman dibuka di Lapangan Sumberagung Moyudan, Rabu (24/7). Kegiatan yang mengangkat tema 'Darma Bakti TMMD Mewujudkan Percepatan Pembangunan di Wilayah' ini dibuka Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa didampingi Kasdim 0732/Sleman Mayor Arm Ronang Sasiarto.

Wabup Danang Maharsa menyampaikan apresiasi dan terimakasihnya kepada pimpinan dan anggota TNI di Kabupaten Sleman yang melaksanakan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung



Wabup Danang Maharsa menyerahkan secara simbolis peralatan kerja untuk kegiatan TMMD. (KR-Istimewa)

Tahap III tahun 2024 di wilayah Moyudan. Melalui program TMMD, pekerjaan pembangunan berbagai sarana dan prasarana yang berat dapat menjadi ringan karena dilaksanakan secara bersama-sama atau gotong royong dengan melibatkan masya-

rakat dan anggota TNI. "Kegiatan TMMD Tahap III Tahun 2024 dapat menggerakkan dan membantu pembangunan infrastruktur di desa, sehingga dapat lebih menggerakkan roda perekonomian masyarakat di Kabupaten Sleman. TMMD

ini diharapkan dapat memadai aspirasi dan kepentingan masyarakat di daerah pedesaan, mengingat proses perencanaannya selalu diawali dengan melibatkan berbagai instansi dan masyarakat," kata Danang.

BPJS Kesehatan Sleman Naikkan Kepatuhan Peserta

SLEMAN (KR) - Untuk menaikkan kepatuhan peserta, BPJS Kesehatan telah menggulirkan berbagai program. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan angka peserta aktif. Hal tersebut yang saat ini juga terus didorong BPJS Kesehatan Cabang Sleman kepada peserta yang kurang aktif.

"Kami memiliki program autodebet untuk mencegah peserta lupa membayar iuran, sehingga tidak ada tunggakan. Selain itu juga telekolektif kepada peserta JKN yang menunggak iuran mulai satu bulan. Selanjutnya ada SMS/WA blast kepada peserta JKN yang menunggak iuran 0-12 bulan.

BPJS Kesehatan juga mempunyai Program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB) kepada peserta yang menunggak iuran 4-24 bulan serta bekerja sama dengan Kader JKN untuk melakukan kunjungan ke peserta yang menunggak iuran 12-24 bulan," terang Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sleman Irfan Qadarusman, Rabu (24/7).

Selain itu, lanjut Irfan, BPJS Kesehatan Cabang Sleman juga melakukan sejumlah langkah untuk meningkatkan jumlah kepesertaan. Seperti melalui koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dan BPJS Ketenagakerjaan.

"Kami sudah melakukan penguatan

rekrutmen Peserta Penerima Upah Badan Usaha (PPU-BU) dengan memberi kemudahan pendaftaran maupun penguatan rekrutmen peserta PBPJ melalui program BPJS Keliling, penyediaan kanal layanan online dan rekrutmen berbasis komunitas," sebutnya.

Pada praktiknya, upaya yang dilakukan BPJS Kesehatan Cabang Sleman tersebut ternyata cukup efektif. Seperti yang dialami Supriyadi (45), warga Nogotirto Gamping Sleman. Dalam kurun beberapa waktu terakhir, dirinya menunggak pembayaran BPJS Kesehatan. Bahkan tagihan mencapai hampir Rp 5 juta untuk dapat mengaktifkan kembali kepesertaan. (Feb)-f



Membangun Kebersamaan, Melindungi Anak Sleman

BERDASAR data Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk usia anak di Kabupaten Sleman berjumlah 320.000 jiwa atau 28% dari jumlah penduduk saat ini. Berbagai permasalahan seperti kekerasan fisik dan seksual, perundungan, kejahatan anak di jalan, perkawinan usia anak, anak berhadapan dengan hukum, miras, penyalahgunaan teknologi informasi, pornografi, serta masalah lainnya, masih kasuistis menimpa anak Sleman.

Guna menjawab permasalahan tersebut, Pemkab Sleman menerbitkan Perbup No 12 Tahun 2018 Tentang Kabupaten Layak Anak, untuk memberikan landasan yang kuat bagi upaya perlindungan untuk anak-anak. Sekaligus sebagai panduan program dan kegiatan seluruh unsur pemerintah untuk mewujudkan Sleman sebagai Kabupaten Layak Anak.

Berbagai langkah dan kebijakan dilakukan antara lain membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) untuk pelayanan perlindungan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan kekerasan, diskriminasi, dan membutuhkan perlindungan khusus. Pelayanan konsultasi terkait permasalahan keluarga oleh tenaga profesi/psikolog bagi orang tua dan anak juga kami nilai urgent untuk diselenggarakan. Untuk itu kami meluncurkan program PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) 'Kesengsem' (Keluarga Sejahtera yang Sembada). Untuk lebih mendekatkan layanan konsultasi bagi masyarakat, kami juga mendorong terbentuknya PUSPAGA di kalurahan dan saat ini terdapat 36 PUSPAGA Kalurahan.

Pencegahan pernikahan dini juga kami galakkan melalui Program Ayo Dukung Sleman Keren. Melalui kelas parenting kami memberikan edukasi untuk meningkatkan kesadaran

Bupati Sleman Kustini



keluarga memahami dampak buruk perkawinan pada usia dini. Untuk mencegah terjadinya kekerasan dan kejahatan yang melibatkan anak, kami meluncurkan kegiatan Gerakan Bersama Perlindungan Anak atau GEBER PENAK yang merupakan kolaborasi antara Pokja Preventif Satuan Tugas/Satgas Pencegahan Kekerasan Anak di Jalan bersama Polresta Sleman didukung Puskesmas. Guna memaksimalkan pendampingan dan pengawasan orang tua atau wali, kami terbitkan Perbup N. 45 Tahun 2020 Tentang Jam Rumah/Jam Istirahat Anak, yang mengatur aktivitas anak untuk tidak keluar rumah pada pukul 22.00 sampai dengan 04.00 WIB.

Guna membangun kolaborasi dan sinergi perlindungan anak sampai pada tingkat keluarga, kami juga menggalakkan Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang terbentuk dari kelompok warga kalurahan atau padukuhan, dan bertugas untuk melakukan analisis situasi, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan semua komponen perlindungan anak. Yang tidak kalah penting tentang hak anak adalah terpenuhinya hak untuk berpartisipasi dalam membangun Kabupaten Sleman. Untuk pemenuhan hak tersebut, kami telah membentuk dan memfasilitasi Forum Anak Sleman (FORANS) sebagai wadah komunikasi dan interaksi antara pemerintah dan anak-anak.

Perlindungan terhadap anak bukan saja tanggung jawab orang tua dan pemerintah, tetapi juga merupakan tanggungjawab seluruh warga negara. Berbagai upaya yang telah Kami lakukan tidak akan dapat membuahkan hasil yang maksimal tanpa kepedulian dan peran serta aktif seluruh masyarakat Sleman. Selamat Hari Anak Nasional, Anak Terlindungi, Indonesia Maju. (Sni)-f

DPRD KABUPATEN SLEMAN
SUARA WAKIL RAKYAT
Jl. Parasamya, Tridadi, Sleman, DIY Kode Pos 55511. Telp (0274)868413, Fax (0274) 868413

KINERJA KOMISI B DPRD KABUPATEN SLEMAN

BUMD Harus Proporsional Antara Profit dan Layanan Sosial



Agus Mas'udi ST

SLEMAN (KR) - Komisi B DPRD Sleman akan mendukung penambahan penyertaan modal bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti Bank Sleman dan PDAM Tirta Sembada. Namun keberadaan BUMD tersebut harus proporsional antara profit dan memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat. Anggota Komisi B DP-

RD Sleman Agus Mas'udi ST mengatakan, eksekutif telah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang penambahan penyertaan modal bagi BUMD di Kabupaten Sleman. Untuk besaran penyertaan modal bagi Bank Sleman masih dalam pembahasan. Sedangkan bagi PDAM Tirta Sembada tinggal pencatatan saja.

"Pada prinsipnya, kami sepakat untuk penyertaan modal bagi BUMD. Untuk PDAM Tirta Sembada, investasinya sudah dilakukan oleh daerah maupun pusat, hanya tinggal mencatatkan saja. Kalau Bank Sleman masih dalam pembahasan," kata Agus Mas'udi, Rabu (24/7). Menurut politisi dari PKS ini, BUMD ini memang profit oriented yakni mencari keuntungan sebesar-besarnya. Dengan harapan dapat meningkat-

kan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman. "Jadi keberadaan BUMD itu untuk menambah PAD Sleman. Soalnya tujuan BUMD itu mencari keuntungan," ucap pria yang kerap disapa Gus Ud ini.

Meskipun demikian, BUMD tidak semuanya profit oriented. Namun juga harus ada pelayanan sosial kepada masyarakat. Misalnya PDAM Tirta Sembada, untuk perumahan, apartemen dan per-

usaha swasta harus menerapkan tarif yang standar. Sedangkan bagi rumah tangga, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) harus mengedepankan pelayanan sosial.

"BUMD itu harus proporsional antara mengejar profit dan pelayanan sosial. Kalau mau ambil untung yang besar, ya bisa di perusahaan swasta. Tapi kalau rumah tangga atau MBR, ya harus pelayanan sosial," ujar Agus.

Hal serupa juga perlu dilakukan oleh Bank Sleman. Jika ingin mencari profit yang besar, penyaluran kredit ke perusahaan. Namun Bank Sleman juga tidak boleh mengesampingkan tujuan dari pendirian Bank Sleman, yakni untuk mengangkat pelaku UMKM. "Bank Sleman jangan melupakan jati dirinya yang dulunya Bank Pasar dimana nasabahnya pedagang pasar. Untuk itu kami minta Bank Sleman ja-

ngan melupakan pelaku UMKM dan pedagang dalam penyaluran kreditnya. Harapannya pelaku UMKM ini bisa naik kelas," tambah Gus Ud.

Senada juga dikatakan Anggota Komisi B lain Surana. Dirinya juga sepakat adanya usulan atau pengajuan penambahan penyertaan modal bagi BUMD yakni Bank Sleman dan PDAM Tirta Sembada. Namun pihaknya meminta harus ada perbaikan manajemen.

"Pertama, kami minta penyaluran kredit itu tidak hanya mayoritas ke 'corporate', tapi mayoritas harus ke UMKM. Perbaikan kedua, SDM harus diberikan pendidikan yang bagus supaya dapat meningkatkan pendapatan," kata Surana.

Dikatakan, Bank Sleman juga perlu memperluas jaringan pemasaran-



Surana

nya. Dengan harapan banyak pelaku UMKM di Kabupaten Sleman yang mendapat pendanaan dari Bank Sleman. "Jumlah UMKM di Sleman ini cukup banyak. Tentu ini menjadi tantangan bagi Bank Sleman bagaimana menyalurkan kreditnya ke pelaku UMKM supaya mereka bisa naik kelas," saran politisi dari NasDem ini. (Sni)-f



Komisi B saat rapat dengan PDAM Tirta Sembada dan mitra kerja lainnya. (KR-Saifulh Nur Ichwan)